



LAPORAN TAHUNAN 2025

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan Anggaran 2025 dapat disusun dan disajikan dalam bentuk buku laporan ini.

Laporan tahunan ini disajikan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan kinerja pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan dan oleh karena itu sumbangan pemikiran dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

Semoga laporan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan atas bantuan semua pihak diucapkan terima kasih.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Pada tahun 2020-2024, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bio energi yang bersifat terbarukan; berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya Perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja

dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien. Pembangunan perkebunan kedepan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 komoditi unggul diantaranya adalah : Karet, Kelapa Sawit, Kopi dan Kelapa.

Pada tahun 2024, luas areal perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan tercatat seluas 2.864.164 Ha dengan produksi 4.878.825. Komoditas utama terdiri dari karet 1.215.910 Ha produksi mencapai 1.008.362 Ton , Kelapa Sawit 1.274.261,13 Ha dengan produksi 3.399.995,63 Ton, Kopi 267.434,98 Ha produksi mencapai 219.585,55 Ton, Kelapa 68.154.00 Ha produksi mencapai 61.647.20 Ton.¹

Perkembangan luas areal perkebunan dari tahun ke tahun berdasarkan data statistik angka tetap 2021 - 2024 :

Tabel 1. Luas Areal Komoditi Unggulan Tahun 2021 s.d 2024

No	Komoditas	Luas Areal			
		2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	1.233.259	1.245.767	1.259.850,40	1.274.261,13
2	Karet	1.283.559	1.285.881	1.227.903,82	1.215.910
3	Kopi	267.781	267.246	266.743,19	267.434,98
4	Kelapa	64.729	68.408	68.263,82	68.154.00

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2021-2024

Produksi 4 Komoditas unggulan Sumsel dari tahun 2021 - 2024 yaitu:

Tabel 2. Produksi Komoditi Unggulan Tahun 2021 s.d 2024

No	Komoditas	Produksi			
		2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	3.445.027	3.354.192	3.370.527,92	3.399.995,63
2	Karet	1.246.559	1.069.561	1.003.780,13	1.008.362
3	Kopi	211.681	208.043	206.655,70	219.585,55
4	Kelapa	58.121	61.274	61.563.76	61.647.20

Sumber : Data Statistik Perkebunan Tahun 2021-2024

1.2 Visi dan Misi

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Visi Sumsel 2025 “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” dengan Misi 2 yaitu :

Misi : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menyajikan data dan analisis mengenai pencapaian, kegiatan dan hasil kerja.
- Memberikan gambaran perkembangan komoditas perkebunan di Sumsel.

1.4 Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

Pelayanan di bidang Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang prasarana dan sarana meliputi sarana produksi, pembiayaan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
2. Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
3. Perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
4. Perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
5. Perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
6. Perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
7. Perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
8. Pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
9. Pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
10. Perencanaan dan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
11. Pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Di bidang ini dilaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan pupuk bersubsidi rumah tangga pekebunan berdasarkan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK, agar petani pekebun dapat meningkatkan produksinya dengan melakukan pemupukan. Selain dari itu dilaksanakan juga pelatihan pembuatan pupuk organik agar petani dapat memanfaatkan limbah perkebunan yang ada untuk dijadikan pupuk organik. Selain itu lahan harus ditingkatkan produktifitasnya melalui perluasan areal tanam dan optimasi lahan serta sertifikasi lahan sehingga lahan menjadi layak untuk dijadikan agunan ke pihak perbankan untuk memperoleh pembiayaan lebih lanjut.

Pelayanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a) Perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b) Perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c) Perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- d) Perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsintan dan unit pengolahan;
- e) Perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f) Perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g) Perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h) Perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i) Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil membangun kerjasama pemasaran hasil perkebunan dalam bentuk pengikutsertaan dalam pameran-pameran seperti pameran hari pangan sedunia, gelar agribisnis panas, Sriwijaya Internasional Expo, South Sumatera Expo, dan lain sebagainya. Melaksanakan pembinaan unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB). Sampai tahun 2024 tercatat ada 413 UPPB yang sudah terbentuk dan telah teregistrasi dan tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data UPPB secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Unit Pengolahan Pemasaran Bersama (UPPB) di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah UPPB (unit)	Ket
1.	Ogan Ilir	22	
2.	Muara Enim	57	
3.	Banyuasin	77	
4.	Oku Timur	14	
5.	Prabumulih	8	
6.	OKI	20	
7.	Lahat	10	
8.	Musi Rawas	24	
9.	Lubuk Linggau	4	
10.	Musi Banyuasin	122	
11.	PALI	16	
12.	OKU	29	
13.	Empat Lawang	7	
14.	Muratara	2	
15.	Palembang	1	
J u m l a h		413	

Pelayanan di bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. Perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. Perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- e. Perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- f. Perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. Perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Peningkatan produktivitas perkebunan sangatlah dipengaruhi penggunaan bibit unggul serta bagaimana pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik. Pelayanan dalam bidang produksi memiliki peran bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tersebut. Peningkatan produktivitas ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan teknis dan bantuan benih/bibit unggul yang bersertifikat, sarana produksi serta pembinaan-pembinaan pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik kepada petani pekebun.

Pelayanan di bidang Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Penyuluhan

Bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. Perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;

- c. Perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. Perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. Pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup dan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang ini melaksanakan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan perkebunan agar melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta melakukan penyuluhan di bidang perkebunan. Pelaksanaan rekomendasi kelayakan usaha perkebunan juga diberikan terhadap perusahaan yang akan mengajukan HGU baru atau perpanjangan. Selain itu menjaga kemitraan perkebunan agar tetap harmonis serta melaksanakan pembinaan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi (SKE) dan sebagainya.

Pelayanan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Pelayanan yang dilakukan berupa pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

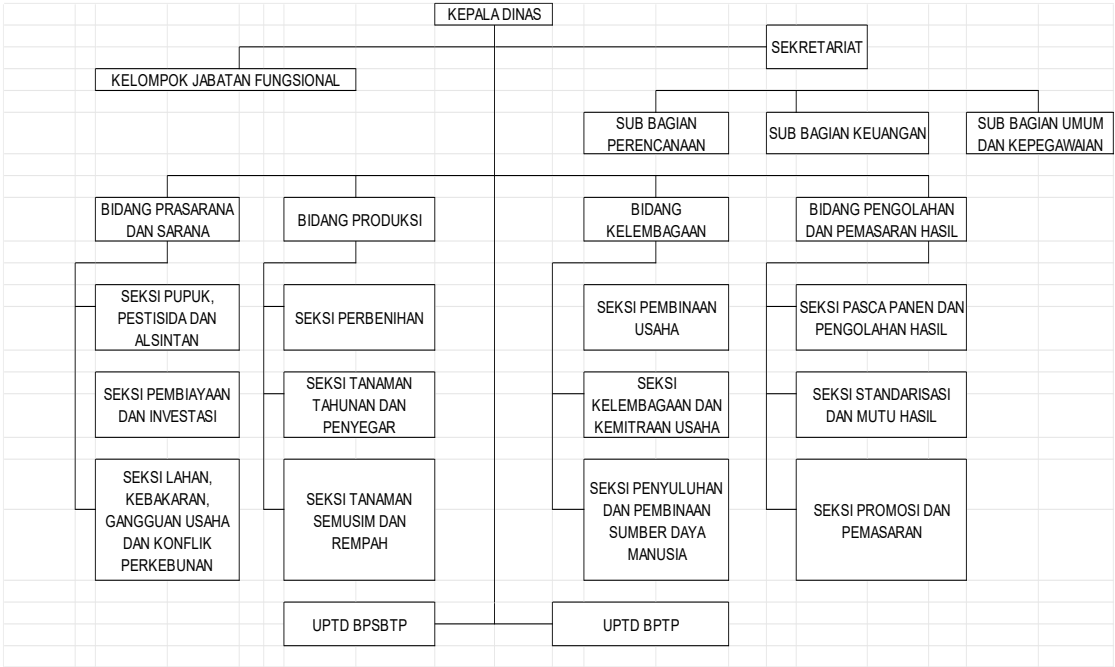
Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanam merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Pelayanan dibidang Proteksi Tanaman Perkebunan

Pelayanan dalam bidang proteksi perkebunan dengan melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



No.	Uraian	Volume	Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 Unit	Baik
2.	Bangunan Gedung Lainnya	10 Unit	Baik
3.	Bangunan Lainnya	4 Unit	Baik

4.	Tanah Bangunan kantor, rumah dan tempat kerja lainnya	10.158 M²	-
5.	Tanah Perkebunan	420.000 M²	-
6.	Kendaraan Roda 4	11 Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	49 Unit	Baik

Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Selama tahun 2020 - 2024 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan, beberapa penghargaan antara lain :

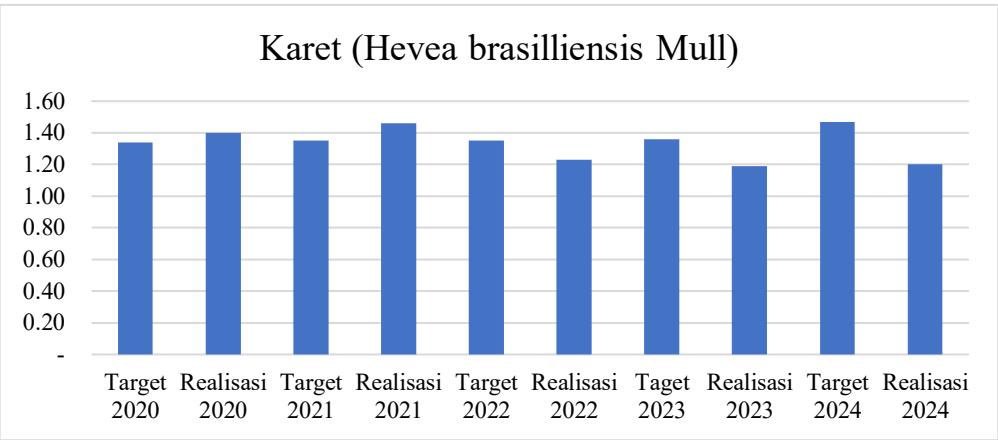
1. Penghargaan dari MURI terkait dengan Program Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kopi diberikan langsung oleh Customer Relation Manager MURI Indonesia. Kegiatan sambung pucuk ini telah dilakukan sebanyak 1 juta sambung pucuk di tahun 2021 dan 1 juta sambung pucuk di tahun 2022 melalui dana bantuan keuangan Gubernur Sumatera Selatan.
2. Penghargaan Anugrah Perkebunan Indonesia, kategori “Pengawalan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan“ diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada hari Perkebunan ke 65 tahun 2022.

Tabel 5. Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Peningkatan Produksi (%)
Kelapa Sawit	3.323.670	3.445.027	3.354.192	3.370.527,92	3.399.995,63	0,43
Karet	1.215.233	1.246.559	1.069.561	1.003.780,13	1.008.362,07	-2,58
Kopi	163.868	211.681,48	208.043,49	206.655,70	218.667,51	3,67
Kelapa	57.732	58.121,20	61.273,50	61.563,76	61.647,20	1,40
Lainnya	93.546	210.489	322.304	178.329,19	190.152,28	25,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

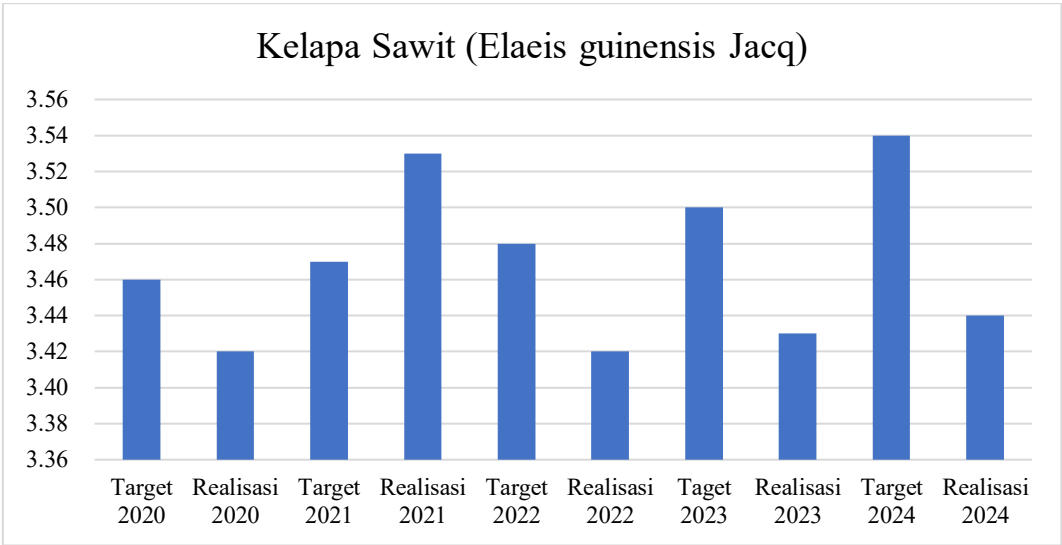
Dari tabel diatas produksi perkebunan komoditi karet mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.008.362,07 ton atau sebesar 0,46% dari tahun 2023 dengan produksi sebesar 1.003.780,13 ton. Tetapi secara rata-rata selama 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar -2,58%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan luas tanaman menghasilkan dari luasan 865,862 Ha pada tahun 2020 turun menjadi 838.711 ha pada tahun 2024.



Grafik 1. Target dan Realisasi Produktivitas Karet Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan selama tahun 2020 – 2024 terjadi fluktuasi produktivitas Karet seiring dipengaruhi harga serta kondisi iklim. Selain dipengaruhi oleh pasar internasional, harga karet pun sangat dipengaruhi oleh kualitas karet. Petani bisa memperbaiki mutu karet sehingga harga yang didapatkan bisa lebih tinggi. Mutu karet harus di jaga begitu juga dengan kadar kering karet karena akan sangat mempengaruhi harga jualnya. Salah satu usaha untuk meningkatkan harga, dengan mendorong industri hilir dalam negeri antara lain pabrik ban, aspal karet dan sebagainya akan dapat memperbaiki harga ditingkat petani sehingga tidak tergantung pada pangsa ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 3.370.527 ton mengalami kenaikan produksi sebesar 29.467 Ton pada tahun 2024 menjadi sebesar 3.399.995 ton. Pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 982.463 Ha dan pada tahun 2024 seluas 986.194 Ha meningkat seluas 3.731 Ha, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 3,44 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3,43.

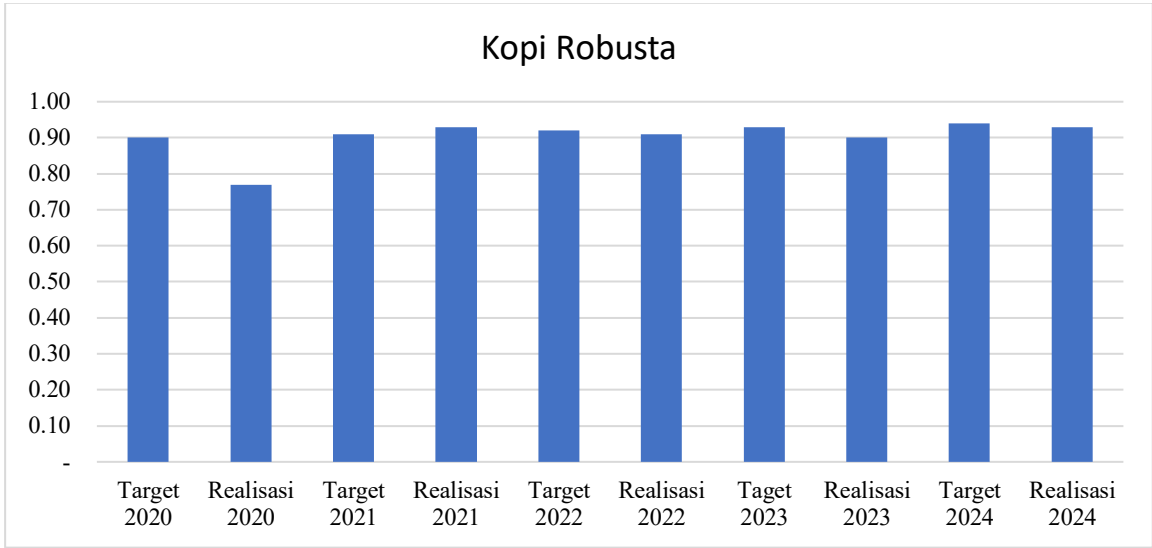


Grafik 2. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat secara umum pencapaian terhadap target produktivitas Kelapa Sawit mengalami fluktuatif, target produktivitas dipengaruhi oleh:

- a) Kegiatan Peremajaan kelapa sawit;
- b) Harga komoditi kelapa sawit yang masih stabil walaupun mulai menurun seiring fluktuasinya harga CPO di tingkat ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi Kopi pada tahun 2024 sebesar 218.667,51 ton dan pada tahun 2023 sebesar 206.655,7 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 12.011 Ton, pada tahun 2024 luas tanaman menghasilkan 233.565 Ha dan pada tahun 2023 seluas 230.318, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 0,93 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,90.



Grafik 3. Target dan Realisasi Produktivitas Kopi Tahun 2020 – 2024

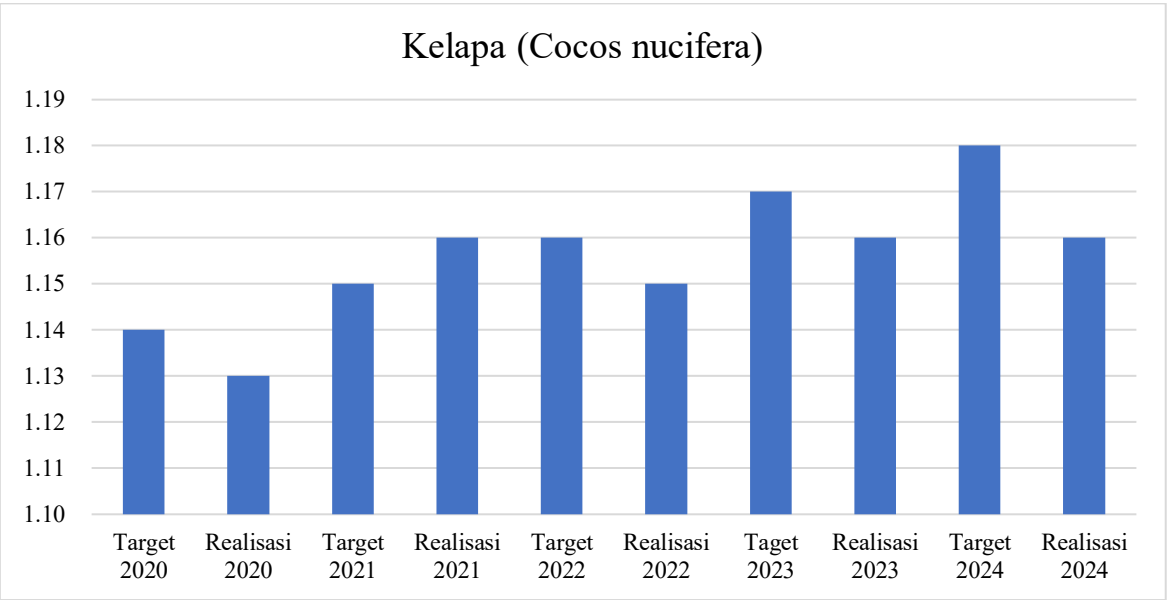
Dari grafik di atas produktivitas tanaman kopi di Sumatera Selatan masih jauh dari standar produksi kopi sesuai anjuran. Produktivitas kopi di Sumatera Selatan menurut data statistik perkebunan hanya 0,93 ton/Ha/Tahun sedangkan standar produktivitas adalah 1,3 ton/Ha/Tahun dan bahkan bisa mencapai 2 ton/Ha/Tahun.

Upaya peningkatan produksi perkebunan kopi, maka akan dilakukan :

- a) Peremajaan tanaman kopi dengan cara rejuvinasi (sambung pucuk) dengan entres yang merupakan klon unggul dengan membangun kebun sumber benih;
- b) Penggunaan bibit kopi SE (*Somatik Embriogenesis*) pada penanaman baru;
- c) Melakukan intensifikasi tanaman kopi.

Untuk meningkatkan produksi kopi, dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan sambung pucuk juga dapat meningkatkan produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari tanaman kopi biasa.

Data produksi komoditi Kelapa pada tahun 2024 sebesar 61.647 ton dan pada tahun 2023 sebesar 61.563 ton, peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,4 %, pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 53.109 Ha dan pada tahun 2024 seluas 53.048, sedangkan produktivitas pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,16.



Grafik 4. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Tahun 2020 - 2024

Dari data grafik di atas, dapat dilihat terjadi fluktuasi produktifitas tanaman Kelapa. Komoditas kelapa tidak seperti komoditas karet dan kelapa sawit yang diusahakan dalam skala perkebunan besar. Banyak tanaman kelapa yang hanya merupakan tanaman

perkarangan sehingga produksinya tidak terdata dengan baik dan tidak begitu optimal sedangkan luas areal kelapa terbesar ada di Kabupaten Banyuasin seluas 7.494 Ha. Untuk meningkatkan produksi kelapa perlu terus dilakukan dengan memberikan bantuan bibit kelapa yang unggul serta pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/ pemeliharaan pada komoditi kelapa tersebut.

Selain luas areal dan produksi komoditi perkebunan, kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari data jumlah usaha perkebunan. Pada tahun 2025 data jumlah usaha pekebunan yang di himpun melalui aplikasi SIPARIBUN berjumlah 203 usaha Perkebunan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan secara rutin setiap tahunnya terus dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar, melakukan Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Besar, Pendataan perkebunan, Pembinaan Amdal Perkebunan dan Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan. Kegiatan pengawasan unit usaha perkebunan juga dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kunjungan langsung ke pabrik dan perusahaan perkebunan.

Pendidikan dan pelatihan terhadap SDM perkebunan perlu menjadi perhatian, karena pelatihan ini bertujuan agar SDM perkebunan memiliki keahlian dan keterampilan baik dalam teknik budidaya maupun kelembagaan usaha perkebunan. Dengan semakin baiknya kualitas SDM perkebunan diharapkan memiliki nilai tawar yang baik sehingga harga ditingkat petani menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan petani menjadi meningkat. Disamping itu, meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan budidaya perkebunan sesuai anjuran sangatlah diperlukan terutama bagaimana menanggulangi hama dan penyakit sehingga dapat meningkatkan umur produktif tanaman.

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMSEL

A. Program dan kegiatan apbd dinas perkebunan provinsi sumsel

Tabel 6. Laporan konsolidasi program dan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbangan Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.563.852.324	100	90,22	14.041.931.721	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	-	100	100	Disbun
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.500.000	100	89,19	116.386.837	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	100	-	100	100	Disbun
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	100	91,11	104.778.747	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100	3 Dok	100	88,12	Disbun
2.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.500.000	100	74,89	11.608.090	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100	1 Laporan	100	11,88	Disbun
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.871.829.000	100	90,92	10.794.143.072	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.544.829.000	100	91,64	10.580.013.072	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 Orang/Bulan	100	792 orang/bulan	100	97,25	Disbun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327.000.000	100	65,48	214.130.000	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	100	5 Dok	100	49,00	Disbun
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.275.550	100	100	164.275.550	Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Kantor	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.989.550	100	100,00	134.989.550	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100	1 Paket	100	82,17	Disbun
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.286.000	100	100,00	29.286.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100	2 Orang	100	17,83	Disbun
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.500.000	100	84,91	520.049.127	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	1 Paket	100	-	99,84	99,84	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.500.000	100	88,55	28.777.480	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	97,00	5,15	Disbun
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	245.000.000	100	85,80	210.203.388	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100	40,00	Disbun
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	100	66,51	16.627.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100	4,08	Disbun

4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	100	22,92	4.584.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	100	2 Dok	100	3,27	Disbun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.000.000	100	89,61	259.857.259	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	100	Laporan	100	47,35	Disbun
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.687.890	100	100	341.687.890	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Tersedia	1 Paket	100	-	100	100	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.900.000	100	100	241.900.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100	1 Unit	100	70,80	Disbun
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100	- ,00	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100			-	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.787.890	100	100	99.787.890	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	52 Unit	100	52 Unit	100	29,20	
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.408.059.884	100	78,33	1.102.988.554	Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	100	42,50	8.500.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	100	1 Laporan	100	1,42	Disbun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	100	80,72	484.309.554	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	12 Laporan	100	6 Laporan	100	42,61	Disbun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.059.884	100	77,43	610.179.000	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	24 Laporan	100	12 Laporan	100	55,97	Disbun
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.000.000	100	96,85	1.002.400.691	Terpeliharanya barang milik daerah	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	800.000.000	100	95,96	767.680.125	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	90 Unit	100	Unit	100	77,29	Disbun
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	100	99,77	44.896.600	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100	Unit	100	4,35	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	100	99,91	189.823.966	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100	Unit	100	18,36	

II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.141.299.560	100	97,17	3.052.487.351	Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasil kan	1 Tahun	100	-	98,10	98,10	
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.118.878.960	100	94,57	1.058.146.233	Terlaksananya pengawasan sarana pertanian	17 Kab/ Kota	100	-	100	100	
1.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1.118.878.960	100	94,57	1.058.146.233	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	100	2 Laporan	100	100	17 Kab/Kota
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam	1.891.375.000	100	99,16	1.875.561.876	Terlaksananya Penerbitan Serifikat	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Pengelolaan Penerbitan Serifikat Benih	130.000.000	100	99,08	128.802.975	Jumlah Serifikat Benih	4.100 Serifikat	100	Sertifikat	100	6,87	17 Kab/Kota
2.	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	125.000.000	100	96,83	121.033.971	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 Tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	100	1 Laporan	100	6,61	17 Kab/Kota
3.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.636.375.000	100	99,35	1.625.724.930	Jumlah Benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	12500 Batang	100	Batang	100	86,52	
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	131.045.600	100	90,64	118.779.242	Meningkatnya Menejemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Tahun	100	-	100	100	
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	131.045.600	100	90,64	118.779.242	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan Mikroorganisme	1 Laporan	100	1 Laporan	100	100	Disbun
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	228.125.000	100	96,44	220.011.429	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	1 Tahun	100	-	96,86	96,86	
A.	Penataan Prasarana Pertanian	228.125.000	100	96,44	220.011.429	Meningkatnya Penataan Prasarana Pendukung	17 Kab/ Kota	100		96,86	96,86	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	28.125.000	100	73,40	20.644.450	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	100	2 Laporan	74,50	9,18	17 Kab/Kota

2.	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	200.000.000	100	99,68	199.366.979	Jumlah Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	100	unit	100	87,67	
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	534.985.000	100	92,94	497.191.349	Persentase Peningkat Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1 Tahun	100	-	93,64	93,64	
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	534.985.000	100	92,94	497.191.349	Meningkatnya Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	17 Kab/ Kota	100	-	93,64	93,64	
1.	Pengendalian Oranisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	404.645.000	100	97,14	393.072.851	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	550 Ha	100	Ha	98,00	74,12	Disbun
2.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130.340.000	100	79,88	104.118.498	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	200 Ha	100	Ha	80,10	19,52	17 Kab/Kota
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1 Tahun	100	-	100	100	
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian	17 Kab/ Kota	100	-	100	100	
1.	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina dan diawasi	18 Laporan	100	Laporan	100	100	17 Kab/Kota
VI	Program Penyuluhan Pertanian	10.431.538.100	100	95,83	9.996.411.576	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1 Tahun	100	-	100	100	
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	10.381.138.100	100	95,82	9.947.382.702	Meningkatnya Persentase Pelaksanaan	17 Kab/ Kota	100	-	100	100	
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	10.381.138.100	100	95,82	9.947.382.702	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	93 Kelompok	100	Kelompok	100	100	
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	50.400.000	100	97,28	49.028.874	Meningkatnya Pembentukan kelembagaan Korporasi Petani	17 Kab/ Kota	100	-	100	100	17 Kab/Kota

1.	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	50.400.000	100	97,28	49.028.874	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	100	Unit	100	100	
	Jumlah Program: 6 Jumlah Kegiatan: 15 Jumlah Sub Kegiatan: 32	29.937.699.984	100	93,01	27.844.780.776	-	-	100	-	99,54		

Realisasi Anggaran

Kegiatan : Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan

Tidak ada anggaran dalam kegiatan pengembangan pelayanan infoemasi pasar komoditas tanaman Perkebunan.

Kegiatan Pengembang Informasi Pasar pada Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan selama 1(satu) tahun 2025. Kegiatan ini meliputi Pengumpulan informasi pasar yaitu informasi harga komoditi perkebunan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Petugas PIP Kabupaten mengumpulkan data harga komoditi perkebunan pada tingkat petani dan pedagang eceran sedangkan Petugas PIP Provinsi mengumpulkan harga komoditi perkebunan pada tingkat retail dan pengepul. Data harga yang terkumpul di Kabupaten diserahkan ke Petugas Provinsi untuk direkap dan dikirimkan ke Pusat melalui aplikasi SIPASBUN 2025.Kegiatan dilaksanakan di provinsi dan di 6 (enam) Kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang. Waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

Harga rata-rata komoditi yang dilaporkan oleh petugas PIP Provinsi Sumatera Selatan meliputi 4 komoditi unggulan perkebunan di Sumatera Selatan yaitu :

1. Komoditi Karet (*Slab Lump* Tebal)
2. Komoditi Kopi (Biji)
3. Komoditi Kelapa (Butir)
4. Komoditi Kelapa Sawit (TBS)

Sedangkan petugas PIP kabupaten/kota melaporkan harga komoditi perkebunan unggulan yang ada di wilayah kerjanya.

Kegiatan : Penetapan Harga TBS

Tidak ada anggaran dalam kegiatan pengembangan pelayanan infoemasi pasar komoditas tanaman Perkebunan.

Harga produk pertanian tergolong sangat fluktuatif dengan rentang tingkat harga yang cukup lebar. Pada waktu musim panen harga sebagian besar komoditi pertanian sangat rendah namun pada saat yang lain bisa sangat tinggi. Harga yang sangat fluktuatif ini secara teoritis akan menyulitkan prediksi bisnis, baik dalam perhitungan rugi laba maupun manajemen resiko. Sedangkan untuk penyelesaian permasalahan fluktuasi harga belum

ada alat/metode yang dapat secara langsung mengantisipasi bahkan mencegah terjadinya fluktuasi harga yang terlalu tinggi yang akan merugikan pihak produsen maupun konsumen. Untuk itu diperlukan upaya yang dapat mengantisipasi dampak yang terjadi akibat dari pengaruh fluktuasi (volume dan harga) komoditi tersebut dengan melakukan pemantauan pasar. Pemantauan pasar diharapkan mampu memberikan informasi atau sinyal kondisi dan situasi pasar yang terjadi di lapangan serta memberikan antisipasi terhadap perilaku pasar yang terjadi sehingga kebutuhan akan komoditi tersebut dapat terpenuhi.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan utama Indonesia dan Indonesia menjadi produsen utama dunia. Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas di daerah sentra produksi, maka perlu difasilitasi dalam bentuk fasilitasi penetapan harga, pembinaan dan evaluasi harga yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang bertanggung jawab.

Seiring dengan perkembangan budidaya kelapa sawit, saat ini permasalahan yang dihadapi di bidang kelapa sawit semakin kompleks, mulai dari permasalahan teknis penanganan pasca panen, pengolahan hingga pemasarannya yang berdampak pada harga kelapa sawit yang terbentuk. Perkebunan rakyat sampai saat ini masih memerlukan pendampingan dari pemerintah terutama terkait dengan kegiatan tata niaga tandan buah segar (TBS) sawit.

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Sub Keg : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG
Tumbuhan dan Mikroorganisme

Tabel 7. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genatik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mirkro Organisem Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

No .	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Saran
			Keuangan	Fisik		
1	Belanja Bahan Bibit Tanaman					
	Belanja Bahan Herbisida	6.250.000	5.150.000	100	Telah Dilaksanakan	
	Belanja Bahan Pupuk NPK	40.000.000	36.500.000	100		
	Belanja Bahan Fungisida	2.800.000	2.372.000	100		
	Benih Kelapa Genjah Pandan Wangi	44.000.000	43.995.600	100		
2.	Belanja Alat Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	1.000.000	801.642	100	Telah Dilaksanakan	

3.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.000.000	18.000.000	100	Telah Dilaksana kan	
4.	Belanja Perjalanan Dinas					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000	11.960.000	100	Telah Dilaksana kan	
5.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.995.600	-		Tidak Ada Kegiatan	
		131.045.600	118.779.242	90,64		

Pada Tahun 2025 kegiatan dukungan perbenihan perkebunan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Sumsel fasilitasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan total pagu anggaran Rp. 131.045.600,- Realisasi keuangan Rp. 118.779.242,- atau 90,64%. sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme pada bulan Februari 2025 sampai dengan Desember 2025 di Kabupaten Banyuasin.

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, Hewan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, melaksanakan Pembangunan Kebun Sumber Kelapa dengan tahapan:

1. Tahapan Persiapan
2. Tahap Persiapan Lahan
3. Proses Pembuatan Lubang Tanam
4. Proses Pemupukan Dasar
5. Tahapan Distribusi Benih Kelapa Pandan Wangi
6. Proses Penanaman Bibit
7. Proses Pemeliharaan
8. Proses Pemupukan, dan
9. Pengendalian Hama dan Penyakit Gulma Daun Sempit

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sub Keg : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hiltikultura, Tanaman dan Perkebunan

Tabel 8. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.

No.		Pagu	Realisasi		Saran
-----	--	------	-----------	--	-------

	Program Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan	Fisik	Permasalahan	
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	2.678.500	-	-	keterlambatan akun PA pada sistem pengadaan	
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	1.547.500	1.100.000	71	Telah Dilaksanakan	
3.	Belanja Barang Untuk Di Jual / Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000	59.999.984	100	Telah Dilaksanakan	
	Bantuan Alat Pasca Panen Tanaman Tembakau					
	- Alat Rajang Manual Tanaman Tembakau di Kabupaten Lahat					
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.774.000	59.908.505	98,6	Telah Dilaksanakan	
		125.000.000	121.008.489	96,81		

Dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Melaksanakan Program/Kegiatan Pengawasan Mutu, menyediakan dan peredaran benih tanaman perkebunan dalam rangka peremajaan/pengembangan tanaman

dan optimallisasi pemanfaatan lahan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan bagi kesejahteraan petani. Tahun ini melalui anggaran pusat mendapat alokasi kegiatan untuk tanaman tebu berupa bongkar ratoon, kegiatan bongkar ratoon dilakukan pemerintah agar : produksi tebu meningkat, rendemen gula naik, hama dan penyakit terkendali, petani untung dan impor gula berkurang. Kegiatan pendukung lainnya berupa perjalanan dinas ke berbagai kabupaten guna mendukung kegiatan Bongkar Ratoon dan kegiatan DBHCHT serta koordinasi dan CPCL untuk kegiatan tanaman semusim lainnya selain tebu dan tembakau.

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sub Keg : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

Tabel 9. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyedian dan Peredaran dan Peredaran Benih Tanaman

No.	Program/kegiata n/Sub.Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Permasalahan	Saran
			Keuanga n (Rp)	Fisik (%)		
1	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor	2.000.000			Tidak terealisasi dikarenakan sistem pengadaan	
2	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- bahan Cetak	2.500.000			Tidak terealisasi dikarenakan sistem pengadaan	
3	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / Benih kopi	1.230.000 .000	1.229.850 .000	100	Telah selesai dilaksanakan oleh Zainal Bakri dan telah diterima oleh penerima bantuan	
4	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / Benih karet	263.025.0 00	263.025.0 00	100	Telah selesai dilaksanakan oleh CV. Aneka Tani Maju Mandiri dan telah diterima oleh penerima bantuan	
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	6.000.000			Tidak terealisasi	

6	Honorarium Narasumber	9.000.000	9.000.000	100	Telah terealisasi	
7	Belanja Perjalanan Dinas	123.850.000	123.849.930	100	Terealisasi (silpa Rp 70,00)	
		1.636.375.000	1.625.724.930	99,35		

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada dua wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Empat Lawang. Penetapan kedua lokasi tersebut didasarkan pada usulan kebutuhan benih yang diajukan oleh kelompok tani melalui dinas perkebunan kabupaten masing-masing. Setiap usulan kelompok tani telah melalui proses verifikasi administratif dan teknis, mulai dari pengecekan kelengkapan dokumen, penilaian kelayakan lahan, hingga memastikan kesiapan kelompok dalam melaksanakan kegiatan peremajaan atau pengembangan tanaman perkebunan. Hanya kelompok tani yang dinilai memenuhi kriteria yang kemudian direkomendasikan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis bantuan yang diberikan dalam kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2025 berupa benih tanaman perkebunan yang disesuaikan dengan kebutuhan peremajaan dan pengembangan komoditas di masing-masing wilayah. Bantuan ini disalurkan setelah melalui proses verifikasi dan penetapan, sehingga jenis dan jumlah benih yang diberikan sesuai rekomendasi teknis dari dinas perkebunan kabupaten dan provinsi.

Program : Penyuluhan Pertanian

Sub Keg : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Tabel 10. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	PAGU	Realisasi		Permasalahan	Saran
			Keuangan	Fisik		
1	Program : Penyuluhan Pertanian	Rp. 5.656.290.000	96,81%	100%	Tidak tersedia nya anggaran untuk bimbingan	Anggaran untuk bimbingan teknis bagi tenaga

	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				teknis bagi tenaga pendamping	pendamping agar dapat tersedia
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					
	Sumber Dana : PAD					
2	Program : Penyuluhan Pertanian	Rp. 4.709.748.100	95,10%	100%	Perlindungan Jaminan Sosial terdapat kendala pada NIK Petani yang tidak terbaca pada data Dukcapil, sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui DBH Sawit.	Perlu dilakukan verifikasi/validasi terkait NIK Petani yang tidak terbaca di Dukcapil agar Anggaran yang tersedia dapat terserap secara menyeluruh.
	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani					
	Sumber Dana : DBH Sawit					

Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Perkebunan yang berkelanjutan dan berkualitas, peran tenaga pedamping sangat penting untung memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan pada para petani. Program Penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan Kapasitas para pada pendamping dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada petani, sehingga dapat mengoptimalkan hasil produksi perkebunan.

Kegiatan : Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit

Pembiayaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor DPA :DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2025 melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2025

Tabel 11. Uraian Pembiayaan Kegiatan Perlindungan Jaminan sosial

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	Rp. 4.446.489.600

2	5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Rentan	Rp. 2.646.720.000
3	5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan	Rp. 1.799.769.600

Tabel 12. Realisasi Jumlah Petani Sawit yang terlindungi

No	Periode Iuran	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Iuran
1	Januari 2025	19.006	Rp. 319.300.800
2	Februari 2025	19.006	Rp. 319.300.800
3	Maret 2025	19.006	Rp. 319.300.800
4	April 2025	19.006	Rp. 319.300.800
5	Mei 2025	19.006	Rp. 319.300.800
6	Juni 2025	19.006	Rp. 319.300.800
7	Juli 2025	19.006	Rp. 319.300.800
8	Agustus 2025	19.006	Rp. 319.300.800
9	September 2025	19.006	Rp. 319.300.800
10	Oktober 2025	19.006	Rp. 319.300.800
11	"November 2025	19.006	Rp. 319.300.800
12	Desember 2025	19.006	Rp. 319.300.800
Total Iuran :			Rp. 3.831.609.600

Tabel 13. Realisasi Kegiatan Penunjang Perlindungan Sosial

Realisasi Kegiatan Penunjang

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	Paket	Rp.9.258.500,-	Rp.3.769.572,-
a.	ATK	1 Paket	Rp.9.258.500,-	Rp.3.769.572,-
2	Belanja Sewa Komputer Unit	Unit	Rp.36.000.000,-	Rp.34.809.600,-
a.	Sewa Komputer	4 Unit	Rp.36.000.000,-	Rp.34.809.600,-
3	Belanja Pakaian Pelatihan	Paket	Rp.50.000.000,-	Rp.35.000.000,-

a.	Perlengkapan Peserta (Baju Kaos)	1 Paket	Rp.14.000.000,-	-
b.	Pakaian Lapangan Petugas Provinsi	1 Paket	Rp.36.000.000,-	Rp.35.000.000,-
4	Perjalanan Dinas	Frekuensi	Rp. 168.000.000,-	Rp. 167.282.600,-
a.	Perjalanan Dinas Biasa	40 Frekuensi	Rp. 168.000.000,-	Rp. 167.282.600,-
Total Penggunaan DBH Sawit			Rp. 4.709.748.100,-	Rp. 4.479.400.972,-

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit telah berhasil memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor kelapa sawit. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Peningkatan partisipasi pekerja dalam program ini menunjukkan keberhasilan dalam sosialisasi dan implementasi di lapangan. Hasil dari program ini juga memperlihatkan adanya penurunan tingkat risiko kerja serta peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial di kalangan pekerja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses di daerah terpencil dan perluasan cakupan program agar lebih inklusif. Dengan evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan, program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat optimal bagi para pekerja di industri kelapa sawit.

Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagai langkah implementasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2024 yang mengatur tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit disebutkan bahwa pengembangan SDM dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit, diadakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 062/HK.230/E-SEKTIM.SDPMKS/06/2025 dan 525/30-V.2/SDM-BUN/2025 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit untuk Tahun 2025 dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis/Fasda Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekebun Kelapa Sawit (SDPMKS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Alokasi dan Realisasi Dana Operasional

Pencairan Tahap I Dana Operasional Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp.135.430.000,- dengan Realisasi

Penggunaan Dana Operasional terhitung tanggal 17 Juli 2025 berdasarkan SPTJB bulan Juli sampai dengan November sebesar Rp.135.235.000,-

Rekapitulasi SPTJB, Pembayaran Pajak dan Jasa Giro

Kelapa Sawit sebesar Rp.135.235.000,- dengan rincian SPTJB sebagai berikut :

Tabel 14. Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Pengembangan SDM Perkebunan

No	Bulan	Pagu Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Juli	135.430.000	48.690.000	86.740.000
2	Agustus	135.430.000	41.255.000	45.485.000
3	September	135.430.000	9.235.000	36.250.000
4	Oktober	135.430.000	21.496.360	14.753.640
5	November	135.430.000	14.558.640	195.000
Sub Total		135.430.000	135.235.000	195.000

Program : Penyuluhan Pertanian

Sub Keg : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Tabel 15. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Berbasis Kawasan

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	PAGU	Realisasi		Permasalahan	Saran
			Keuangan	Fisik		
1	Program : Penyuluhan Pertanian	Rp. 50.400.000	97,74%	100%	Anggaran yang terlalu kecil untuk kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	Anggaran pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani agar dapat ditingkatkan
	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Berbasis Kawasan					
	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani					

Kegiatan Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi pusat perkebunan kelapa sawit 10 Kab/Kota : OKI, MUBA, MUARA ENIM, LAHAT,

EMPAT LAWANG, OKU, OKUT, OKUS, PRABUMULIH dan PAGAR ALAM. Pelaksanaan kegiatan berupa program penyuluhan pertanian kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis kawasan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dilaksanakan oleh bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan pada Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa hal kendala yang dihadapi seperti rendahnya pemahaman petani terhadap konsep korporasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.

Program : Perizinan Usaha Pertanian

Sub Keg : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan

Tabel 16. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam daerah Kab/Kota

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	PAGU	Realisasi		Permasalahan	Saran
			Keuangan	Fisik		
1	Program : Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.900.000	Rp. 36.747.540	100%	Anggaran kegiatan yang kecil untuk pengawasan dan pembinaan perusahaan perkebunan di provinsi sumatera selatan	Anggaran Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar dan izin Usaha Pertanian agar dapat ditingkatkan

Pemberian Izin Usaha Perkebunan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 perusahaan wajib memenuhi berbagai ketentuan antara lain: legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi Pembangunan kebun dan atau unit pengolahan, kepemilikan sarana dan prasarana dan system pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penerapan AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan Masyarakat/koperasi setempat dan pelaporan. Tujuan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha Perkebunan salah satunya adalah mengevaluasi sejauh mana kepatuhan Perusahaan terhadap semua peraturan yang berlaku, mengevaluasi legalitasi perizinan dan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan. Sasaran dari kegiatan ini Adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perkebunan Besar Negara dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta khususnya pada Perusahaan di Lintas Kabupten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu dengan jumlah anggaran Rp. 1.118.878.960,-. Program ini telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 856.403.917,- (76,54%) dan realisasi fisik 100%. Adapun rincian kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 17. Kemajuan Fisik dan Keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik %
			(Rp.)	%	
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.118.878.960	856.403.917	99,16	100
1.	Belanja Baha-Bahan lainnya	15.000.000	58.825.355	99,4	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat tulis kantor	6.000.000	58.825.355	79,7	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.500.000	4.995.000	47,5	100
4.	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	692.283.400	468.701.400	67,7	100
5.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000	9.876.000	98,7	100
6.	Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia	16.5000.000	7.650.000	46,3	100
7.	Belanja Sewa Peralatan Umum	67.500.000	67.370.500	99,8	100
8.	Belanja Perjalanan Dinas biasa	258.000.000	236.109.764	91,5	100
9.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	43.095.560	42.000.000	97,4	100

Pelaksanaan kegiatan utama program ini, mendukung kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian antara lain:

Kegiatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian ini yaitu kegiatan memberi sarana kepada Kelompok Unit Pengolahan

Pemasaran Bersama (UPPB) berupa 75 unit gerobak sorong, 75 unit bak plastik di Kab. OKU, alat pasca panen karet di Kab. OKUT, solar dryer 1 unit di Kab. Lahat alat dan mesin pengolahan kopi huller 2 unit, timbangan duduk 2 unit di Kab. MURA dan Kab. OKUS gerobak sorong 204 unit di Kab. OKUT, MUBA, OI, MURA, PALI, PRABUMULIH, MUARA ENIM, OKI, PAGAR ALAM dan OKU.

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Tabel 18. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kode	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realiasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,	128.802.975,	99,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	99,08
5.1.02.01	Belanja Barang	130.000.000,	128.802.975,	93,20
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	93,20
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	17.500.000,-	16.309.397,-	77,48
	- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	17.500.000,-	16.309.397,-	
		3.500.000,-	2.711.897,-	77,48
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000,-	2.711.897,-	97,13
	- Cetak dan Penggandaan Sertifikat Benih	14.000.000,-	13.597.500,-	97,13
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,-	13.597.500,-	99,99
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			99,99
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.500.000,	112.493.578,	99,99
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	99,99
		112.500.000,	112.493.578,	
		-	-	
		112.500.000,	112.493.578,	
		-	-	
		112.500.000,	112.493.578,	
		-	-	

Sesuai dengan kewenangannya UPTD BPSBTP Sumatera Selatan menerbitkan Sertifikasi/Surat Keterangan Mutu Benih setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT), sertifikasi yang diterbitkan meliputi :

A. Surat Keterangan Mutu Benih Biji Karet dan Preheated Kelapa Sawit

B. Surat Keterangan Mutu Kecambah Sawit

C. Sertifikat Mutu Benih dalam polybag (Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Lada, Kakao, Pinang dan Kelapa).

Sertifikat/Surat Keterangan Mutu benih diterbitkan setelah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan layak sesuai hasil laporan yang dibuat Pengawas Benih Tanaman (PBT).

Sub Kegiatan :
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya.

Tabel 19. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

Kode	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realiasi Keuangan	
			(Rp)	(%)
5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,	199.366.979,	99,68
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	99,68
5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000,	199.366.979,	100
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	-	-	100
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000,-	10.000.000,-	100
5.1.02.02.08.0018	- Belanja Perencanaan Rehab Gedung Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
		6.000.000,-	6.000.000,-	100
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	6.000.000,-	6.000.000,-	100
	- Belanja Jasa Pengawas Konstruksi Gedung	4.000.000,-	4.000.000,-	100
5.2		4.000.000,-	4.000.000,-	99,67
5.2.03				99,67
5.2.03.01	Belanja Modal	190.000.000,	189.366.979,	99,67
5.2.03.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	99,67
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.000.000,	189.366.979,	99,67
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	99,67
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,	189.366.979,	
	- Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	
		190.000.000,	189.366.979,	
		-	-	
		190.000.000,	189.366.979,	
		-	-	
		190.000.000,	189.366.979,	

Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 199.366.979,- (99,68%) dan Realisasi Fisik sebesar 100% dengan penyedia CV. Mitra Berdikari Madina.

Dengan adanya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD melalui dana APBD Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada

masyarakat menjadi lebih baik dan maksimal sebagai salah satu syarat pelayanan UPTD BPSBTP yang berstandar Mutu SNI ISO 9001:2015.

Kegiatan : Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Tahun 2025

Tabel 20. Kegiatan Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Realisasi Fisik (%)
1	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	Rp. 350.000	–	–	–
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak, cetak spanduk, leaflet dan buku peraturan terkait kebakaran lahan/kebun dan gangguan usaha perkebunan	Rp. 16.590.000	–	–	–
3	5.1.02.04.001.00001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pencegahan, penanggulangan kebakaran lahan dan GU Perkebunan	Rp. 73.400.000	Rp. 73.334.360	99,91	100
4	5.1.02.04.001.00001	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi, koordinasi, menghadiri undangan	Rp. 40.000.000	Rp.30.784.138	76,96	80
Total			Rp. 130.340.000	Rp. 104.118.498	79,88	80

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RKPPLP, sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan, Identifikasi Potensi Gangguan Usahan Perkebunan serta ISPO pada perusahaan perkebunan dan telah terealisasi sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 13 Perusahaan Perkebunan. Dalam rangka

melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi gangguan usaha perkebunan terlaksana di 6 kabupaten. Monitoring dan evaluasi KTPA dan brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun terlaksana di 4 kabupaten.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan antara lain; adanya proses revisi dan pergeseran anggaran kegiatan yang menyebabkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan, input dokumen ke aplikasi E-Sumsel terkadang terjadi pelambatan karena sistem aplikasi error.

CAPAIAN KINERJA SEKTOR PERKEBUNAN

Perkembangan Luas Areal dan Produksi

Tabel 21. Data luas lahan per komoditi (Sawit, Karet, Kopi).

No.	Jenis Komoditi	Luas Areal			
		TBM	TM	TR	Jumlah
1.	KARET (<i>Hevea brasiliensis mull</i>)	244.981,07	838.711,09	132.218,00	1.215.910
2.	KOPI ROBUSTA (<i>Coffea canephora</i>)	14.525,16	233.565,24	18.702,04	266.792,44
3.	KOPI ARABIKA (<i>Coffea arabica</i>)	75,24	560,30	7,00	642,54
4.	KELAPA SAWIT (<i>Elaeis guinensis jacq</i>)	264.053,01	986.193,97	24.014,15	1.274.261,13

Sumber : Angka Tetap Statistik Tahun 2024

Tabel 22. Data produksi (ton) dan produktivitas (kg/ha).

No.	Jenis Komoditi	TM	Jumlah Produksi	Produktivitas
1.	KARET (<i>Hevea brasiliensis mull</i>)	838.711,09	1.008.362,07	1.202,28
2.	KOPI ROBUSTA (<i>Coffea canephora</i>)	233.565,24	218.667,51	936,22
3.	KOPI ARABIKA (<i>Coffea arabica</i>)	560,30	918,04	1.638,48
4.	KELAPA SAWIT (<i>Elaeis guinensis jacq</i>)	986.193,97	3.399.995,63	3.447,59

Sumber : Angka Tetap Statistik Tahun 2024

Program Unggulan dan Perkebunan

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas melalui perkembangan pebenihan, Intensifikasi, Ekstensifikasi.
2. Perlindungan Tanaman Perkebunan.
3. Peningkatan dan Pengembangan Sapras.
4. Peremajaan tanaman Perkebunan.

A. Administrasi dan keuangan

1. Belanja, Program APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Belanja perangkat daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Total Pagu Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 29.937.679.984,- yang terdiri atas :

Belanja Operasi	:Rp. 29.216.012.094,-
- Belanja Pegawai	:Rp. 11.544.829.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	:Rp. 17.671.183.094,-
Belanja Modal	: Rp. 721.687.890,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 341.687.890,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 380.000.000,-

Belanja langsung terdiri atas 6 Program dan 32 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

b. Program dan Anggaran APBD		
1	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.563.852.324,-
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 3.141.299.560,-
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 228.125.000,-
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 534.965.000,-
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.900.000,-
6	Program Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp. 10.431.538.100,-
<i>Total.....</i>		29.937.679.984,-

B. Sumber Daya Dinas Perkebunan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan juni 2025 berjumlah 56 orang dan 41 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang secara lengkap disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 23. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	<i>PNS dan PPPK</i>		
	SMA	20	20,61
	D3	3	3,10
	S1	50	51,55
	S2	24	24,74
	Total.....	97	-
2.	<i>Non PNS</i>		
	SD	1	2,08
	SMA	10	20,84
	D3	1	2,08
	S1	35	72,92
	S2	1	2,08
	Total.....	48	-

Tabel 24. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	<i>PNS dan PPPK</i>		
	Laki-laki	53	54,63
	Perempuan	44	45,37
	Jumlah	97	
2.	<i>Non PNS</i>		
	Laki-laki	24	50,00
	Perempuan	24	50,00
	Jumlah	48	

Tabel 25 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	ASN (PNS)		
	IV/d	1	1,79
	IV/b	6	10,71
	IV/a	12	21,42
	III/d	13	23,21
	III/c	7	12,5
	III/b	7	12,5
	III/a	2	3,58
	II/d	5	8,92
	II/c	2	3,58
	II/b	1	1,79
2.	ASN (PPPK)		
	Penata Muda (IX)	32	78,06
	(VII)	1	2,43
	(V)	8	19,51

Total pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 berjumlah 145 orang yang terdiri dari Pegawai PNS berjumlah 56 Orang, PPPK berjumlah 41 orang dan Pegawai Non PNS berjumlah 48 Orang.

RENCANA PROGRAM STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, maka pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan yaitu :

- A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Kegiatan :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- H. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**
 - a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
- I. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**
 - a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih
 - b. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - c. Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- J. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**

- a. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganiseme

K. Penataan Prasarana Pertanian

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- b. Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya

L. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

M. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian

N. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

O. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Anggaran yang diterima oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Dana Anggaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp. 29.937.679.984,- Realisasi Rp. 27.844.780.776,-.

B. SARAN

Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan di upayakan menggunakan konsep koorporasi dan Pengembangan Kawasan terutama yang menjadi komoditi unggulan yang ada di Provinsi Sumatera, sehingga komoditi yang menjadi unggulan di kab/Kota dapat berkembang dan memiliki nilai tambah bagi para petani komoditi yang ada di Kab/Kota dengan demikian kesejahteraan petani dapat menjadi lebih baik lagi.